

# **PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) MELALUI PENDEKATAN KLASTER: *CRITICAL REVIEW* KEBIJAKAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH DI JAWA BARAT**

**Fahmi Rizal<sup>1</sup> dan Roni Kastaman<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung – Sumedang KM. 21. Jatinangor 40600  
E-mail : fahmi.rizal@unpad.ac.id

## **ABSTRAK**

Setelah Porter (1990) menggagas konsep klaster industri untuk meningkatkan daya saing negara Amerika, terjadi perhatian yang serius dari peneliti, birokrat, praktisi, pemerintah baik di Negara Maju maupun Negara Berkembang dalam mengujicoba konsep klaster Porter untuk menghela daya saing industri. Best practice strategi klaster industri dalam meningkatkan ekonomi wilayah di Negara-negara lain mendorong pemerintah menetapkan klaster industri sebagai paket kebijakan yang digunakan untuk menghela industri kecil menengah selama periode tahun 2000-2012. Telah banyak program dan fasilitasi yang digulirkan dalam rangka penumbuhan sentra UKM menjadi klaster dengan alokasi sumberdaya yang besar, namun tidak menunjukkan perubahan “UKM Naik Kelas”. Artikel ini bertujuan untuk menelaah konsep klaster industri serta implementasi kebijakan pengembangan IKM di ranah empirik dengan studi kasus kebijakan klaster industri pengolahan buah di Jawa Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah telaah kritis (*critical review*) atas konsep klaster industri Porter (1990) dibandingkan dengan konsep klaster yang lain sebagai rujukan. Hasil penelitian menemukan bahwa pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster di beberapa daerah banyak yang mengalami kegagalan. Penyebab utamanya adalah pemerintah berasumsi *one size fit all approach* terhadap keberhasilan model klaster Porter dalam meningkatkan daya saing industri Amerika. Terdapat keunikan pada beberapa daerah di Indonesia, sehingga konsep Klaster Porter harus diadaptasi untuk pengembangan industri pengolahan buah Jabar atau sentra-sentra industri lainnya. Penerapan model klaster untuk di Indonesia lebih cocok dengan konsep klaster yang telah dikembangkan di Negara Berkembang seperti yang diajukan oleh Schmidt-Nadvi, UNIDO, Andersson et. al. karena model klaster tersebut dibangun berdasarkan basis industri nasionalnya berupa UMKM sehingga dari sisi keunikan, masalah dan tantangan relatif sama. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster harus ada proses adaptasi konsep tidak bisa disamakan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing.

**Kata Kunci:** Konsep Klaster Industri, Telaah Kritis (*Critical Review*), Klaster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat, Model Diamond Porter.

## PENDAHULUAN

Klaster industry telah menjadi konsep yang terkenal dan menjadi *sine qua non* juga rujukan kebijakan pengembangan ekonomi di banyak negara (Rosenfeld, 2002). Penelusuran di internet menghasilkan banyak sekali web lembaga riset, asosiasi industri, NGO, kosultant, Negara, Kota, Wilayah melakukan studi klaster industri. Konsep klaster industri semakin fenomenal akibat keberhasilan penerapan kebijakan klaster industri di sejumlah negara maju maupun di negara berkembang dalam meningkatkan daya saing industri. Negara-negara Berkembang yang telah berhasil mengujicobakan konsep klaster diantaranya: Brazil (Sinos Valley-Klaster Sepatu), India (Tiruppur, Ludhiana, Iirrupur, Agra dan Jaipur-Klaster Pakaian Rajutan), Kenya (Eastland-Garmen; Kamukunji-Klaster Produk Logam; Ziwani-Klaster Perbaikan Kendaraan), Afrika Selatan (Western Cape-Klaster Pakaian), Mexico (Guadalaraja, Leon-Klaster Sepatu), Pakistan (Sialkot-Klaster Peralatan Bedah), Peru (Gamarra-Klaster Pakaian) dan Ghana (Suame-Klaster Perbaikan kendaraan dan Pekerjaan Logam) (Harvie, 2007; UNIDO, 2006).

Mempertimbangkan keberhasilan Negara lain dalam mengadopsi konsep klaster industri dalam meningkatkan daya saing wilayah, Pemerintah Indonesia secara eksplisit baru menjadikan strategi klaster industri sebagai alat kebijakan peningkatan daya saing industri nasional pada Tahun 2008 dengan diterbitkannya Perpres No. 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang menetapkan bahwa klaster industri sebagai *tools* kebijakan yang digunakan untuk mencapai visi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Hingga Tahun 2014 telah disusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri (KI) Prioritas, yakni Klaster Industri Agro (12 KI), Klaster Industri Alat Angkut (4 KI), Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 KI), Klaster Basis Industri Manufaktur (8 KI), Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu (3 KI), Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 KI).

Program fasilitasi penumbuhan klaster industri oleh Pemerintah telah dilakukan selama periode Tahun 2000-2012. Kementerian Koperasi dan UKM (2007) menyatakan bahwa program fasilitasi penumbuhan sebanyak 1.111 sentra menjadi klaster UMKM di Tahun 2001 dengan bantuan dana sebanyak 200 Milyar ternyata tidak efektif, yaitu hanya 9% sentra yang berhasil berkembang menjadi sebuah klaster. Sisanya yaitu 81% tidak memunculkan perubahan pada sentra, yang diistilahkan dengan “laksana menggarami laut”. Hasil evaluasi kinerja klaster industri agro Tahun 2013 oleh Kementerian Perindustrian ditemukan sebagian besar Klaster Industri yang berbasis UMKM belum berkembang seperti yang diharapkan. Di sisi lainnya, fasilitasi penumbuhan klaster terus berlanjut di berbagai daerah di Indonesia dengan menyerap anggaran biaya yang tidak sedikit. Selama periode 2006-2013 di Jawa Barat terdapat program pengembangan klaster industri pengolahan buah di Kabupaten/Kota Subang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Suciayumajakuning) yang tergabung dalam wadah pengusaha Masyarakat Klaster Buah (MASTERBU). Seperti halnya klaster industri lainnya, KI Pengolahan Buah Jawa Barat belum memperlihatkan kinerja klaster yang diinginkan.

Memperhatikan fakta empirik berupa banyaknya kegagalan penerapan kebijakan klaster industri, menarik untuk membuat telaah kritis (*critical review*) atas konsepsi klaster industri serta implementasi kebijakan klaster industri yang telah diaplikasikan. Nampak bahwa hasil riset terdapat *success stories* kebijakan klaster industri khususnya di Negara Berkembang dan Maju, disisi lain ditemukan kegagalan penerapan klaster industri khususnya di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode telaah kritis (*critical review*) terhadap konsep klaster industri yang diperkenalkan Oleh Porter (1990) dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nation* dengan model yang terkenal yaitu Model Diamond Porter. Porter ini merupakan pioner konsep klaster yang banyak dirujuk dan dikembangkan untuk diaplikasikan di berbagai negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri.

Penulis membandingkan teori Porter dengan konsep klaster industri Porter yang yang dimodifikasi dan dikembangkan oleh sejumlah peneliti melalui telusur pustaka baik cetak maupun online, kemudian menambahkan komentar dan kritik kaitannya dengan studi kasus pengembangan UMKM pengolahan buah di Jawa Barat. Tujuannya adalah memberikan gambaran sejauh mana penelitian atas klaster industri sudah dilakukan, pelbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan (kontroversi) mengenai kebijakan atau konsep klaster industri. Sehingga terdapat kejelasan (*clarity*) atau *template* kebijakan klaster industri dalam tataran praktis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejauh ini diyakini bahwa konsep klaster industri sebagai alat kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan daya saing industri di Indonesia. *Pertama*, terdapat kesesuaian antara konsep klaster dengan karakteristik UMKM di lapangan. Konsep tersebut menjelaskan manfaat dari pengelompokan aktivitas ekonomi di lokasi tertentu, sedangkan karakteristik UMKM di Indonesiapun memiliki kecenderungan berkelompok (*clustered*) di lokasi tertentu. (Marijan, 2005 Sandee et. al., 1994; Kuncoro dan Hidayati, 2004; Dessy, 2007). *Kedua*, adanya *success stories* di beberapa negara bahwa konsep klaster telah menjadi mekanisme yang ampuh untuk mengatasi keterbatasan UMKM dalam hal ukuran usaha sehingga mampu bersaing dalam lingkungan pasar global (UNIDO, 2002; Hakansen, 2003; Bappenas 2004).

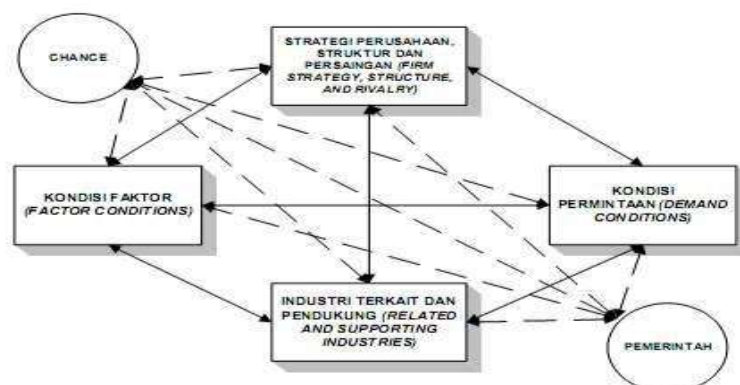
### *Konsep Klaster Porter*

Penggagas konsep klaster industri yang pertamakali adalah Porter (1990), memperkenalkan konsep klaster industri (*industrial cluster*) dalam bukunya “*The Competitive Advantage of Nation*” sebagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing negara Amerika Serikat. Porter mendefinisikan klaster sebagai kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi-institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi.

*“cluster asa geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a particular field linked by commonalities and complementarities (Porter, 1990)”*.

Meskipun Porter belum mendefinisikan kluster secara jelas, tetapi ia telah menghubungkan antara kinerja sebuah negara dalam ekonomi global yang diringkaskan dalam kata “daya saing” dengan “kluster”. Konsep kluster muncul setelah ia mengamati 16 distrik industri yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Amerika dan Eropa Tahun 1990.

Menurut Porter, daya saing negara dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor yang disebut sebagai faktor “*diamond*”. Diamond dibentuk oleh (1) kondisi faktor (*factor condition*), (2) kondisi permintaan (*demand conditions*), (3) industri terkait dan pendukung (*related and supporting industries*), dan (4) strategi, struktur dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure and rivalry*). Porter juga memasukkan 2 faktor yang berhubungan secara tidak langsung melalui: (1) peran promosi (*role of chance*) dan (2) peran pemerintah (*role of government*).



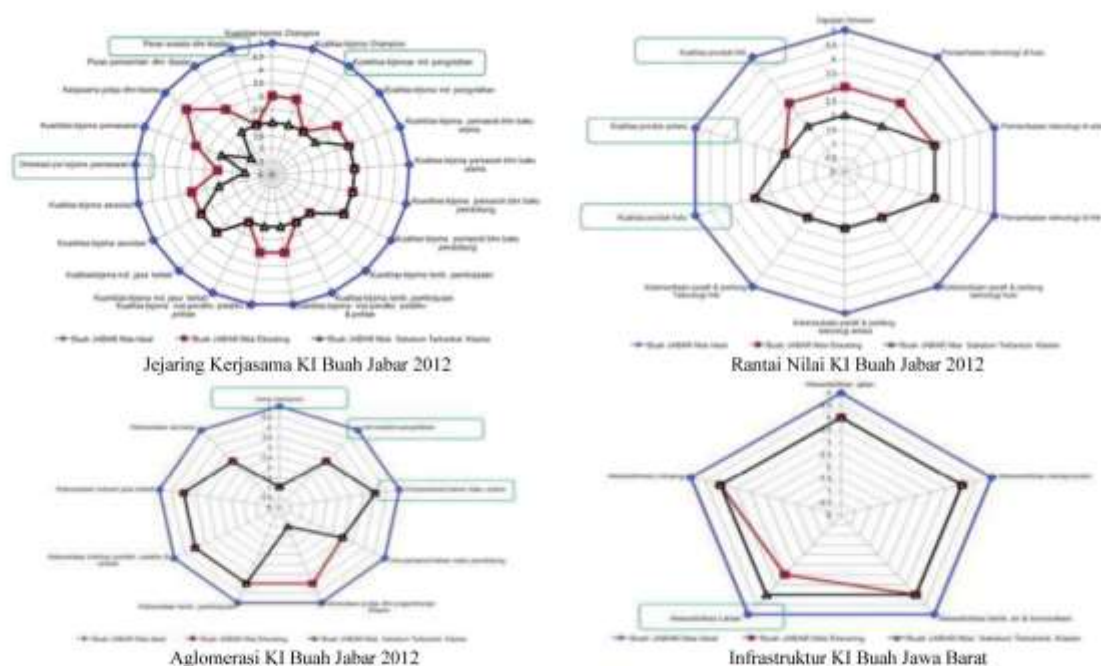
Gambar 1. Model Berlian Porter (Porter's Diamond Model)

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa sebuah kinerja kluster ditentukan oleh 4 (empat) faktor penyusun Model Diamond ditambah dengan faktor promosi dan peran pemerintah. Secara filosofis model kluster Porter ditujukan sebagai tool untuk meningkatkan daya saing sebuah negara.

#### *Klaster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat*

Klaster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat selanjutnya disebut Masterbu merupakan gabungan kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) minuman dan makanan di Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Industri inti klaster pengolahan buah Jawa Barat yaitu IKM *juice* (mangga, sirsak, jambu, nenas, jeruk), IKM sirup (mangga, sirsak, jambu, nenas, jeruk), IKM puree (mangga, sirsak, jambu, nenas, jeruk), IKM manisan kering (mangga, jambu, nenas, dll), IKM selai/jam, IKM dodol (mangga, sirsak, jambu, nenas), IKM manisan basah (mangga & jambu), IKM cocktail (mangga, jambu, nenas) dan IKM pasca panen (packaging buah segar).

Kinerja Kluster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat selama Tahun 2006-2012 mengalami perkembangan yang kurang signifikan. Gambar 2 memperlihatkan kinerja jejaring kluster masih sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa KI Buah Jabar masih sebatas aglomerasi pelaku usaha, sehingga rantai nilai yang dihasilkan juga masih rendah. Jika dilihat dari fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah, juga prasyarat kluster yaitu infrastruktur pendukung kluster buah sudah cukup memadai, seyogyanya Masterbu mampu melakukan aksi bersama yang lebih luas lagi baik sifatnya kerjasama horisontal maupun vertikal sepanjang rantai nilai.



Gambar 2. Kinerja Kluster Industri Pengolahan Buah Tahun 2006-2012

### Telaah Kritis Kebijakan Kluster Industri untuk Peningkatan Daya Saing UMKM

Pada bagian awal dipaparkan bahwa implementasi kebijakan penumbuhan sentra menjadi kluster industri oleh Kementerian Koperasi dan UKM mengalami banyak kegagalan, begitupun fasilitasi penumbuhan kluster industri berbasis IKM oleh Kementerian Perindustrian selama 2006-2012 belum memperlihatkan kinerja kluster yang diharapkan. Oleh karenanya telaah kritis atas kegagalan tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kluster Industri Merupakan Konsep Multidimensi

Peters (2004) menyatakan bahwa kluster disebut sebagai “*chaotic concept*” atau konsep yang dapat membingungkan apabila tidak ada upaya penulusaran akan aspek-aspek strategis dari kluster. Hal ini disebabkan antara lain oleh: *Pertama*, didasarkan tidak adanya definisi kluster yang disepakati secara umum sejak pertamakali Porter menggagas konsep kluster.

*Kedua*, konsep kluster itu sendiri memiliki beberapa kemiripan dengan konsep yang lain, seperti konsep aglomerasi, *industrial district* dan lain-lain. Martin dan Sunley (2002) menegaskan bahwa konsep kluster merupakan sebuah penegasan pentingnya faktor lokasi. Oleh karena itu, sebenarnya konsep dasar yang menjadi embrio munculnya kluster industri dari Porter (1990) telah ada sejak awal abad 18, yaitu konsep *Land Rent Analysis* dari Von Thunen (1826). Model Von Thunen menjelaskan bahwa produksi pertanian dan penggunaan lahan (*land use*) akan terspesialisasi atau mengelompok dengan pola konsentris mengelilingi kota. Selanjutnya, Alfred Marshall (1890) menjelaskan fenomena pengelompokan unit usaha pada lokasi yang sama yang mampu menciptakan efisiensi ekonomi berupa urbanisasi ekonomi dan lokalisasi ekonomi (Tabel 1).

Tabel 1. Ikhtisar Pendekatan Teoritis yang Berkaitan dengan Konsep Kluster

Theoretical Approaches	Theoretical Approaches	Main Reference
Land Rent Analysis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agricultural production and land use would specialise or agglomerate in concentric cycles around the city</li> </ul>	Von Thunen (1826), Ilbery and Healey (1996)
Classical Agglomeration Theory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• External economic of scales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Urbanization vs localization economies                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Labor market pooling</li> <li>▪ Input Sharing</li> <li>▪ Technology Spillover</li> <li>▪ Diversity</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Agglomeration and industry location</li> <li>• Interindustry Linkages and interdependency                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Growth pole</li> <li>○ Industrial district</li> </ul> </li> </ul>	Marshall (1890), Weber (1929), Ohlin (1933), Hoover (1937)
Industrial District	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thriving concentration of firms on ‘third Italy’</li> <li>• Clustering of firms in specific localities according to industrial sector</li> </ul>	Becattini (1987), Brusco (1982), Garofoli (1984)
Flexible and Specialization	<ul style="list-style-type: none"> <li>• From economic of scale to flexible form of industrial organization</li> <li>• Untraded interdependencies                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Embedding the economic within the social, cultural and institutional structure</li> </ul> </li> <li>• Industrial organization and business culture</li> </ul>	Piore and Sable (1984), Scott (1988), Storper (1995)
Cluster Industry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cluster and competitive advantage of nation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cooperation and rivalry</li> <li>○ Capital Social (trust, embeddedness)</li> <li>○ Supporting and related industry</li> <li>○ Network and geographical proximity</li> </ul> </li> <li>• Clusters typology</li> <li>• Driven factors to cluster competitiveness</li> <li>• SMEs Cluster</li> </ul>	Porter (1990), Markusen (1996), Meyer-Stamer (2000), Altenburg (2002), Anderson et. al (2004), UNIDO (2000)

Sumber: Bakele and Jackson, 2006

Pada tahun 1980-an berkembang konsep *Industrial District*, yaitu berkembangnya daerah-daerah industri di Italia yang ditandai dengan pengelompokan dari sejumlah unit usaha pada lokasi tertentu berdasarkan pada sektor industri yang diteliti oleh Becattini (1987), Brusco (1982) dan Garofoli (1984). Dalam hubungannya dengan konsep *Industrial District*, muncul lagi konsep baru yaitu organisasi industri yang bersifat fleksibel (*flexible*) dan khusus (*specialization*) dari sejumlah unit usaha yang ada di *industrial district* tersebut. Baru pada tahun 1990, klaster industri yang dipelopori oleh Porter menjadi sebuah *breakthrough* konsep pengelompokan unit usaha pada lokasi tertentu.

Dengan demikian menjadi jelas ketika pemerintah menetapkan untuk mengadopsi konsep klaster sebagai alat kebijakan membangun industri nasional seperti di negara lain yang berhasil tentu akan menjadi bias apabila tidak ada upaya keras untuk mencoba mengkaji secara ilmiah kejelasan konsep klaster. Pada banyak diskusi ditemukan bahwa terdapat kecenderungan “meremehkan” kedalaman dari konsep klaster yang begitu multidimensi dan kompleks. Pengkajian hanya sebatas dari terminologi “cluster” yang dialihbahasakan secara mudah adalah “kelompok”, kemudian diterjemahkan secara bebas mengenai pengelompokan industri pada suatu wilayah dengan mengabaikan pondasi ilmiah didalamnya.

## 2. Kegagalan dalam Strukturisasi Variabel

Djamhari (2006), menyatakan bahwa kegagalan pemerintah dalam menumbuhkan sentra menjadi klaster industri disebabkan oleh kegagalan dalam mengidentifikasi dan menemukan (*fact finding*) faktor-faktor penentu daya saing klaster. Proses variabel dari konsep klaster industri semakin penting, mengingat selama 10 tahun terakhir konsep klaster mendapat perhatian begitu luas dari berbagai *stakeholders* di banyak negara. Implikasinya adalah semakin banyak konsep klaster yang diperbaharui (*renewed concept*), sehingga variabel klasterpun menjadi *urgent* dilakukan supaya tidak menjadi bias.

Porter (1990), sebagai penggagas daya saing klaster menyatakan bahwa variabel klaster ditentukan oleh lima faktor, yaitu: 1) kondisi faktor *input*, 2) kondisi permintaan, 3) industri terkait dan pendukung, 4) Strategi perusahaan dan pesaing, serta 5) peran pemerintah. Ford Foundation (2009) menambahkan variabel klaster dari Porter yaitu faktor pembagian sumberdaya dan aktivitas serta komplementaritas. Schmidz dan Nadvi (1995), menyimpulkan variabel klaster terdiri dari adanya eksternalitas ekonomi serta aksi bersama. Adapun UNIDO (2004), menambahkan variabel klaster dari Schmidz dan Nadvi yaitu faktor modal sosial. Penjelasan lebih rinci mengenai variabel klaster diungkapkan oleh Andersson *et. al.* (2004), yaitu konsentrasi geografis, spesialisasi, saling keterkaitan, daur hidup klaster, aktor klaster, ambang batas aktor klaster (*critical mass of actor cluster*) serta pemerintah. Begitu juga variabel klaster menurut Harvie (2007) terdiri dari kedekatan jarak, peluang pasar, modal sosial, adaptasi terhadap pasar global, serta kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa kondisi variabel klaster sangat beragam dan perlu pengkajian terlebih dahulu ketika klaster dijadikan instrument peningkatan daya saing UMKM.

### 3. Implementasi yang sifatnya “one size fit all approach”

Secara alamiah klaster itu unik, artinya karakteristik masing-masing klaster adalah berbeda-beda. Keunikan klaster tersebut memiliki keterkaitan dengan keunikan faktor-variabel yang dimiliki klaster. Lebih lanjut, peningkatan daya saing UMKM melalui pendekatan klaster tidak bisa diseragamkan “one for all” atau disebut “one size fits all approach” seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini (Marijan, 2005). Contohnya adalah penggunaan variabel klaster dari Porter (1990) yang banyak digunakan oleh pemerintah terhadap sejumlah klaster di Indonesia. Oleh karena itu, dapat difahami jika pada akhirnya program tersebut mengalami kegagalan.

*“The general feature of clusters may have limited applicability in specific case. Clusters are inherently idiosyncratic in nature. Not elements discussed above may be present, or even desirable, in the specific case. Some elements may be more critical under certain circumstance and the connection between element may vary” (Andersson et. al, 2004).*

Implementasi kebijakan klaster di Indonesia dapat dikatakan secara mayoritas mengindahkan aspek keunikan sebuah klaster. Di atas dijelaskan bahwa satu variabel dari model klaster mungkin tidak cocok dengan klaster ditempat lain, sebaliknya variabel yang tidak ada bisa jadi justru menjadi kunci untuk menggerakkan klaster di tempat lain. Maka dari itu, penting untuk diketahui bahwa sebelum implementasi kebijakan klaster harus dapat memetakan keunikan klaster tersebut diikuti dengan pemilahan pada setiap variabel kuncinya.

### 4. Sektoral Mindset

Program-program fasilitasi penumbuhan klaster biasanya dimulai dengan pembentukan *working group* atau kelompok kerja (pokja). Pembentukan *working group* tersebut seharusnya diikuti oleh semangat lintas sektor, mengingat secara konsepsi klaster industri merupakan bentuk entitas bisnis yang jejaringnya lintas sektor. Misalnya saja Klaster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat entitas bisnisnya meliputi petani buah, pengusaha olahan buah, *supplier* buah, pengusaha alat dan mesin, pengusaha kemasan, lembaga keuangan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan lembaga riset, industri kimia dan lainnya. Begitu juga dalam lingkup pemerintahan, *working group* setidaknya harus melibatkan lintas sektor seperti dari Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Bappeda, Universitas serta lintas kewenangan wilayah mulai dari Pusat, propinsi hingga Kabupaten dan Kota. Dalam praktiknya, pokja tersebut hanya diisi oleh *leading project* yaitu Dinas Perindustrian Bidang Agro Propinsi Jawa Barat. Implikasinya ketika pendampingan di daerah (Kab/Kota) kurang mendapat dukungan dari dinas di daerah.

Sepintas mungkin dikatakan bahwa permasalahan ego sektoral project merupakan masalah klasik, namun hal ini perlu dibenahi supaya perencanaan pembangunan ekonomi dapat sinergi dan berkelanjutan mulai dari level pusat, propinsi dan daerah. Pelibatan *stakeholders* dalam pokja sangat penting untuk proses *embeddedness* sehingga ada kesamaan visi dan misi membangun daerah.



## KESIMPULAN

Klaster industri telah menjadi konsep yang fenomenal dalam lingkaran kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Di beberapa negara strategi kebijakan klaster industri dalam meningkatkan daya saing wilayah berhasil dilakukan, namun kebijakan klaster industri di Indonesia masih belum signifikan pengaruhnya dalam meningkatkan daya saing sektor industri.

Hasil telaah kritis yang dilakukan, kegagalan penerapan kebijakan klaster industri khususnya dalam meningkatkan daya saing wilayah adalah kegagalan dalam menstrukturisasi variabel konsep klaster. Tahapan penting sebelum menggulirkan kebijakan klaster industri di daerah adalah menemu-kenali keunikan klaster serta variabel-variabelnya. Hal ini selalu terlewatkan mengingat ketidaktahuan akan kompleksitas serta kedalaman klaster industri itu seperti apa. Poinnya adalah para peneliti atau praktisi kurang melakukan proses inkuiri serta telaah kritis atas implementasi konsep klaster. Proses adaptasi konsep klaster tanpa dilakukan modifikasi konsep disesuaikan dengan keunikan lokal yang ada menghasilkan preskripsi yang salah atas masalah-masalah yang ada sebelumnya. Secara sederhana konsep klaster dari Porter tujuannya untuk pengkatan daya saing negara amerika, sedangkan di indonesia diterapkan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga perlu dikaji ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, T., Sylvia, S. S., Jens, S., Emily, W. H. 2004. *The Cluster Policies Whitebook*. International Organization For Knowledge Economy And Enterprise Development (IKED). Sweden.
- Bakele, W. G and Jackson, W. R. 2006. *Theoretical Perspectives on Industrial Cluster*. Research Paper No. 5. University of Virginia. United State of America.
- Bappenas. 2004. *Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas. Jakarta
- Dessy. I. 2007. *Strengthening Cluster Building in Developing Country Alongside The Triple Helix : Challenge For Indonesia Cluster-A Case Study of The Java Region*. MPRA Paper No. 5831-November.
- Djamhari, C. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sentra UKM Menjadi Klaster Dinamis*. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006
- Ford Foundation. 2009. *Generating Local Wealth, Opportunity, and Sustainability through Rural Clusters*. Volume I • March 2009. Regional Technology Strategies, Inc. Carrboro, North Carolina

- Hakansen, L. 2003. *Epistemic Communities And Cluster Dynamics: On The Role of Knowledge In Industrial District*. DRUID Summer Conference 2003. Copenhagen, June 12-14, 2003.
- Harvie, C. 2007. *SME Clustering and Networking and its Contribution to regional Development and Competitiveness: an Overview of the Key Issues*. The 4<sup>th</sup> in a global economy conference 2007, 9-10<sup>th</sup> July 2007. Australia.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2006. *Kajian Strategis Pengembangan Tahap Lanjut Sentra Bisnis UKM Pasca Dukungan Program Perkuatan*. Jurnal Pengkajian Koperasi Dan Ukm Nomor 1 Tahun I – 2006
- Kuncoro, M dan Hidayati, A. 2004. *Konsentrasi Geografis Industri Manufaktur di Greater Jakarta dan Bandung Periode 1980-2000: Menuju Satu Daerah Aglomerasi?*. Empirika, Vol. 17, No. 2, Desember 2004
- Marijan, K. 2005. *Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Klaster*. Insan Vol. 7 No. 3 Desember. Fakultas Ekonomi Universitas Air Langga.
- Peters, D. J. 2004. *Revisiting Industri Cluster Theory and Method For Use in Public Policy: An Example Identifying Supplier-Based Clusters in Missouri*. University of Missouri, Colombia.
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press Mc Millan Inc. New York
- Rosenfeld, S.A, 2002. *Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies In Less Favoured Regions*. European Union-Regional Innovative Strategies, North Carolina, USA. [www.rtsinc.org](http://www.rtsinc.org)
- Sandee, H., Rietveld, P., Supratikno, H and Yuwono, P. 1994. *Promoting Small Scale and Cottage Industries in Indonesia An Impact Analysis for Central Java*. Research Memorandum 1994-10. Amsterdam.
- Sunley, P. 2002. *Deconstructing Clusters : Chaotic Concept or Policy Panacea?*. Journal of Economic Geography, 3,1 (6 June 2002)
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 2006. *SME Clusters and Responsible Competitiveness in Developing Countries*. United Nations Industrial Development Organization. Vienna